

# Karakteristik dan Nilai-nilai Islam Tinjauan Filosofis

Oleh : Juhaya S. Praja



*Juhaya S. Praja, lahir di Tanjung sari Sumedang 30 Januari 1953 Sarjana-Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung (1980) Master (MA) dalam Ilmu Agama Islam (1985) diraih di IAIN Syarif. hidayat-Tullah. sedangkan Derajat Doktor dalam Ilmu Agama Islam diperoleh di Pasca sarjana IAIN syarif hidayatullah (1988). Selain sebagai staff pengajar di almamaternya, ia juga pernah menjabat*

*Ketua jurusan Perbandingan Madhab dari Hukum Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, pernah menjabat sebagai PJS Dekan dan PJS Pembantu Rektor I Fak. Syari'ah IAIN sunan Gunung Jati Bandung, serta aktif mengikuti lembaga-lembaga kajian Islam diluar negeri maupun dalam negeri.*

## Pendahuluan

Era industrialisasi suatu zaman di mana terjadi proses perkembangan teknologi oleh penggunaan ilmu pengetahuan terapan. Suatu zaman yang ditandai dengan ekspansi produksi besar-besaran dengan menggunakan tenaga mesin untuk tujuan yang luas, baik bagi barang-barang produsen maupun konsumen, melalui angkatan kerja. Proses ini seluruhnya disertai dengan urbanisasi yang meningkat. (Henry Fratt Fairchild et al., *Dictionary of Sociologi and Related Sciences*, Totowa, New Jersey, 1970, p.155)

Perubahan-perubahan yang menyertai era industrialisasi, terutama di bidang-bidang ekonomi, berakibat pula pada bentuk perubahan yang kompleks dalam kelompok sosial dan proses sosial. Perubahan tersebut menggiring masyarakat yang hidup pada era industrialisasi pada

kemestian patuh dan taat kepada nilai-nilai masyarakat industrial. Nilai-nilai tersebut belum atau tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat non-industri, seperti masyarakat agraris. Oleh karena itu, bahasan tentang proyeksi kehidupan dalam era industrialisasi dan bagaimana Islam sebagai agama, baik dalam pengertian inklusif<sup>1)</sup>

1). Pengertian agama yang bersifat inklusif mendefinisikan agama sebagai sistem sosial yang menekankan perlunya individu-individu dalam masyarakat dikontrol oleh kesetiaan menyeluruh kepada seperangkat sentral kepercayaan dan nilai. (Ronald Robertson, *The Sociological Interpretation of Religion*, New York, 1972, p. 37; Cf Nurcholish Madjid, *ISLAM Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1987, h. 135). Contoh definisi ini seperti yang dianut Weber, yakni yang menekankan pada agama sebagai the grounds of meanings, atau pandangan-pandangan dasar di mana sekelompok manusia atau masyarakat manusia mengorganisasikan dirinya ke dalamnya yang menyangkut konsepsi-konsepsi kosmologis dasar dalam hubungannya dengan eksistensi manusia (Ibid, p. 35)

maupun dalam pengertian eksklusif<sup>2)</sup> menjadi amat relevan

### Nilai Kebenaran dalam Islam: Keabadian dan keuniversalannya

Ontologi nilai-nilai kebenaran dalam Islam pada hakikatnya adalah nilai kebenaran yang bersifat ilahi dan insani. Kebenaran yang bermuara pada sumber kebenaran ilahi dan kebenaran insani. Oleh karena itu, sesuatu yang dinilai benar didasarkan pada patokan-patokan *naqliyyah* (wahyu), *'aqliyyah* (rasional), *hisiyyah-tajribiyyah* (inderawi-empirik), dan *kasyfiyyah* (intuitif).<sup>3)</sup> Dua sumber kebenaran ini seringkali disalahfahamkan sehingga selalu menimbulkan problem mengenai nilai kebenaran itu sendiri. Nilai kebenaran yang bersumber dari ilahi (wahyu), atau dari manusia sendiri (akal)?

Nilai kebenaran dalam Islam jelas sekali mengandung suatu nilai kesucian, karena kebenaran itu datang dari Tuhan. Kebenaran insani pun adalah kebenaran yang sama-sama bermuara dan berasal dari Tuhan, karena manusia pun adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena kebenaran itu pada hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka ia dapat dipastikan mempunyai sifat abadi dan universal.

Kerangka epistemologis nilai-nilai dalam Islam dapat diketahui manusia melalui dua pintu utama: pintu wahyu dan akal. Wahyu memberikan panduan tentang pandangan hidup dan nilai-nilainya yang meliputi, antara lain, tentang nilai kesucian yang erat dengan rasa kebaikan, kebenaran, keadilan, kebebasan, persamaan, kemuliaan dan segala sesuatu yang serba tinggi (*sublime*). Adanya rasa kesucian yang serba mencakup itu pada

jiwa manusia, secara alamiah atau fitriah, menjadikan manusia yang disebut dalam Islam *haniif*. Dengan kata lain, nilai-nilai tentang kebaikan, keadilan, kebebasan, persamaan, dan yang serba tinggi dalam Islam adalah nilai-nilai yang pasti sesuai dengan fitrah manusia (*natural*) di mana tahap perkembangan manusia dan masyarakatnya.

Nilai-nilai kebenaran dalam Islam itu justru akan selalu dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dalam setiap tahap perkembangannya, baik pada masyarakat primitif maupun modern, dan pasca modern. Pelaksanaan nilai-nilai itu pun dapat terkontrol dan terkendali dengan melihat aspek aksiologis daripada nilai-nilai kebenaran itu. Penilaian dari aspek aksiologis inilah yang dapat menunjukkan dengan jelas universalisme nilai-nilai dalam Islam.

Universalitas nilai-nilai Islam dalam sejarahnya menampakkan diri dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai itu membentuk norma-norma yang pada gilirannya melahirkan hukum dan pranata sosial. Norma halal-haram

2). Pengertian agama yang bersifat eksklusif menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang memadukan antara kepercayaan-kepercayaan dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, hal-hal terpisah dan terlarang, kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatukan semua pegikutnya ke dalam suatu komunitas moral tunggal yang disebut umat (Ibid, p. 37). Definisi ini seperti yang dicontohkan Dukheim.

3). Salah satu contoh usaha menjelaskan persoalan ini adalah apa yang dilakukan Ibn Taimiyyah sebagaimana dapat dijumpai dalam karya-karyanya yang utama dalam bidang ini, seperti *Dar'u Ta'arudl al'aql wa al-naql* (12 jilid); *Minha jal Sunnah al-Nabawiyah* (2 jilid); *Ma'aarij al-Wushuul, Inna Ushuul al-Diin wa Furu'ahaa qad bayyanahaa al-Rasuul*.

memasuki berbagai bidang kehidupan masyarakat. Halal-haram yang menyangkut tata nilai hubungan-hubungan antara manusia dengan sesama manusia sebagai individu dalam bidang keperdataan telah melahirkan hukum yang dikenal sebagai fiqh mu'amalah munakahat, dan mawarits. Hubungan antara manusia sebagai individu dan warga masyarakat dengan negara dan pemerintah telah melahirkan hukum yang disebut fiqh jinayah dan siyasah syar'iyah, baik dalam arti siyasah *dusturiyyah* (ketata negaraan), maupun *duwaliyyah* (hubungan internasional). Tetapi janganlah dilupakan bahwa norma halal-haram dan pelembagaan, atau pembentukan pranata sosialnya tidak pernah terkelupas dari nilai-nilai keimanan yang sejarahnya telah menunjukkan perkembangannya yang monumental dengan lahirnya Ilmu Kalam (Tauhid). Pranata sosial dan kemasyarakatan yang lahir dari kandungan nilai-nilai Islam itu pun diikat oleh suatu nilai etika yang khas Islam yang sangat dalam dan esensial, yakni nilai-nilai sufistik yang tercermin dalam perilaku individu dan masyarakat Muslim yang disebut akhlaq (*al-akhlaaq al-kariimah*). Sejarah pun menunjukkan kedalaman bidang ini hingga lahir ilmu tasawuf dengan sejumlah alirannya yang kemudian dikenal dengan nama tarekat.

Fiqh, tauhid, dan tasawuf ini mencerminkan Iman-Islam-Ihsan yang disebut Nurcholish Madjid sebagai trilogi ajaran Islam. (Nurcholish Madjid, "Islam, Iman dan Ihsan sebagai Trilogi Ajaran Islam", Budhy Munawar Rachman, Ed., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Yayasan Paramadina, 463-482). Iman-Islam-Ihsan ini memuat nilai-

nilai kebenaran Islam. Islam tidak absah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga mustahil tanpa inisial Islam. Islam membawa kedamaian (*salaam*) dan keselamatan (*salaamah*). Iman menghantarkan rasa aman sentosa dan terlindung (*amanah*). Ihsan menghantarkan hidup yang bahagia.

Trilogi ajaran Islam yang sarat nilai itu menampakkan universalitasnya dalam lima aksiologi utama<sup>4)</sup> tolok ukur penilaian kebenaran segala tindakan dan praksis ajaran Islam dalam kehidupan.

Kelima praksis nilai dasar ajaran Islam untuk menjamin warga masyarakat, baik perorangan maupun sebagai kelompok, yaitu, jaminan dasar akan:

1. keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. (Lihat Albaqoroh ayat 256, dan *al-Kaafiruun*, ayat terakhir);
2. keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum;
3. keselamatan akal (*psikhis*) warga masyarakat;
4. keselamatan keluarga, keturunan, dan kehormatan;
5. keselamatan harta, milik pribadi, dan

4) Dalam hal ini, Al-Syathibi, *al-Muwafaqoot*, juz iii, menggunakan istilah *al-kulliyaaat al-Khams* (lima tujuan universal ajaran Islam). Sedangkan al-Ghazali, *al-mustashfaa*, memakai term *Maqaashid al-syar'ii'ah* (lima tujuan syariat Islam), yakni untuk memelihara 1. agama; 2. jiwa; 3. akal; 4. keturunan dan kehormatan; 5. harta. Abdurrachman wahid mengeruakan kelima tujuan universal ajaran Islam ini secara lebih rinci. (Cf Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Perabdan Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman, Ed., *Ibid.*, p. 546)

profesi.

Jaminan dasar yang merupakan nilai universal ajaran Islam menuntut adanya pemerintah berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, yakni berlaku adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan haknya masing-masing. Tujuannya tiada lain adalah untuk menjamin keadilan sosial yang sebenarnya.

Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi warga masyarakat memuat nilai dasar hubungan antar warga masyarakat, yang meliputi nilai saling menghormati dan tenggang rasa. Jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan nilai moral yang kuat, baik dalam arti etis maupun kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin, karena keluarga merupakan ikatan sosial yang paling dasar. Oleh karena itu, keluarga tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan. Kesucian keluarga ini melandasi jaminan keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat yang sangat tinggi.

Jaminan dasar akan keselamatan harta dalam arti pemilikan merupakan sarana bagi perkembangan hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu.

Kelima jaminan dasar sebagai kerangka aksiologis nilai-nilai kebenaran Islam menampilkan kosmopolitanisme Islam yang telah tampil sejak Nabi Muhammad saw. mengatur masyarakat Madinah hingga penyerapan berbagai peradaban lain di sekitar dunia Islam oleh para pengikutnya dikemudian hari.

Terjadilah penyerapan sisa-sisa peradaban Yunani Kuno yang berupa helenisme hingga peradaban anak benua India. Di Indonesia pun terjadi proses serupa. Unsur dominan kosmopolitanisme Islam terlihat dengan hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya yang heterogenitas politik. Kehidupan beragama yang eklektif selama berabad-abad merupakan unsur dominan utama di lingkungan peradaban Islam yang boleh jadi amat menakjubkan. Betapa umat Islam dapat bersatu dalam keragaman seperti yang diungkapkan van Gruneboom, Guru Besar pada Department of Near Eastern Studies, UCLA, dalam karyanya, *Islam Unity and Diversity*, (Islam, kesatuan dan Keragaman).

Sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Alquran memberi peluang yang luas untuk tumbuhnya nilai-nilai Islam secara universal dan kosmopolitan. Terminologi yang diperkenalkan para ulama tentang ayat-ayat (*qath'iy*) yang mengandung pengertian yang pasti dan tidak dapat diganggu gugat maknanya, dan ayat-ayat (*dzanniyah*) yang masih mengandung pernyataan hipotesis, mendukung lahirnya Islam sebagai agama yang berperan sepanjang masa. Oleh karena itu, memasuki era industrialisasi, Islam tidak akan kehilangan relevansi dan perannya dalam masyarakat dan keseluruhan peran sosialnya.

### Interpretasi Nilai-nilai Keagamaan pada Era Industrialisasi Suatu Format Aksiologi

Untuk menginterpretasi nilai-nilai keagamaan pada era industrialisasi harus dilihat bagaimana nilai-nilai formal yang mendasari masyarakat industrial. Nilai-nilai

tersebut tentu saja akan kita ambil dari apa yang nyata dalam masyarakat industrial bukan di negeri Muslim. Di samping itu, dalam konteks masyarakat Islam Indonesia, untuk menuju masyarakat industrial diperlukan pengalaman tentang bagaimana proses perubahan yang terjadi dari masyarakat non-industrial menuju masyarakat industrial. Dengan kata lain, diperlukan kelayakan dalam melakukan alih teknologi terapan dan mekanisme dalam proses industrialisasi yang akan menggiring kepada perubahan perilaku dan tatanan nilai sumber daya manusianya.

Jock Young merumuskan tujuh nilai formal yang melandasi masyarakat industrial, yaitu: (Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1987, p.128)

#### 1. Kesenangan yang tertunda.

Menunda upah dan kesenangan kepada para pekerja sampai tiba saat yang telah disepakati bersama, seperti awal bulan sebagai saat penerimaan gaji, sistem cuti; atau hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur kerja, adalah nilai formal dalam kehidupan masyarakat industri. Kesenangan tertunda serupa ini bagi umat Islam tidak menjadi masalah sepanjang tidak menghilangkan nilai saling suka-suka dan persyaratan yang tidak bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam. Sejarah turunnya Alquran surat al-Dluha, menggambarkan suasana penundaan kesenangan untuk kemenangan yang lebih besar dan bernilai. Sementara itu, mengenai kesepakatan penundaan kesenangan dalam masyarakat industri tidak menjadi masalah sepanjang sesuai dengan nilai yang diajarkan Nabi ketika ia bersabda bahwa orang Islam terikat oleh syarat-syarat yang

mereka buat (*al-muslimuuna 'alaa syuruuthihim*) sepanjang tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

2. Perencanaan kerja atau tindakan masa datang. Dalam masyarakat industri, membuat perencanaan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, sistem pembukuan, perkantoran, dsb. menjadi amat penting. Peranan perencanaan sangat dihargai dan mempunyai nilai khusus dalam Islam. Ingatlah peristiwa Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman. Ia ditanya tentang rencana apa yang akan ia lakukan dalam mengatur masyarakat Yaman serta kemungkinan-kemungkinan mengambil rujukan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang akan diambilnya.

3. Tunduk kepada aturan-aturan birokrasi. Keparahan taat kepada aturan-aturan dan sistem birokrasi lebih nampak dalam masyarakat industri dari pada masyarakat non-industri, masyarakat pertanian umpamanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem dan mekanisme birokrasi seperti ini pada gilirannya menghilangkan otonominya dan membuatnya tidak berdaya menentukan pilihan lain. Ia terpaksa menjadi fatalistis. Ketaatan kepada peraturan birokrasi seperti yang digambarkan di atas perlu diwaspadai agar tidak keluar dari kerangka nilai aksiologis ketaatan itu sendiri. Ketaatan kepada peraturan ditolerir sepanjang dalam kerangka ketaatan kepada nilai-nilai Ilahi dan perpanjangan tangannya (Lihat surat al-Ma'idah ayat 59). Perlu juga dicatat, sifat fatalistis karena nilai ini perlu dihindari agar tidak sampai merusak nilai tauhid, termasuk mengganggu penunaian ibadah *mahdloh*, mengingat ketatnya penggunaan

waktu, seperti untuk waktu solat.

4. Kepastian, pengawasan yang lebih detail. Sebagai kelanjutan dari nilai sebelumnya, yakni taat kepada sistem dan mekanisme birokrasi, masyarakat industri harus tunduk kepada pengawasan yang detail. Nilai ini melahirkan subnilai tentang guna dan harga seseorang itu sama dengan tingkat keahlian dan keterampilannya. Oleh karena itu, *skill* menjadi mutlak penting, bukan lagi "kearifan" atau "kebijakan" saja yang nyaris tidak dianggap berguna bagi masyarakat industri.

Dalam hal nilai keempat ini, penilaian atas diri seseorang memang lebih bersifat materialistis. Islam memberikan penilaian berimbang atas harga dan guna seseorang, baik yang bersifat spiritual, seperti keimanan, dan ketakwaan, maupun yang bersifat material, seperti keahlian dan skill. Lihat surat al-Hujurat (*inna akramakum indallahi atqaakum* dan al-Isra' *qul kullun ya'malu 'alaa'syaakilatih*)

5. Rutin, dapat diramalkan. Karena nilai-nilai yang dipatuhi masyarakat industri itu sudah begitu pasti dan mengikuti sistem dan mekanismenya sendiri, maka mereka menjadi manusia yang bekerja secara rutin; dapat diketahui awal dan akhirnya. Mereka terstrukturkan oleh rutinitas dan seolah telah menentukan nasibnya sendiri yang berujung pada kepasrahan.

6. Sikap instrumental pada kerja yang melahirkan nilai ke-7, yakni kerja keras yang produktif dinilai sebagai kebaikan. Akibat nilai ini ialah terjadinya "masyarakat mesin" atau "mesin masyarakat" yang didalamnya kerja keras dan produktif menjadi sumber penghargaan atas seseorang. Ketujuh nilai ini menggiring masyarakat industri ke dalam suasana

kompetitif. Dalam kaitannya dengan nilai Islam, nilai dua terakhir ini tidaklah menjadi persoalan, karena kerja adalah bagian dari nilai seseorang. Akan tetapi, kerja itu diberi sifat kesalehan. Sementara sikap kompetitif bukan saja dianjurkan, melainkan diperintahkan dengan sama-sama dibarengi dengan sifat kesalehan. Dengan kata lain, kerja dan kompetisi harus disemangati oleh nilai-nilai kebajikan dan tertuju kepada nilai puncak, yakni tauhid. Ini semua untuk memelihara aspek aksiologis dari kehidupan manusia agar manusia itu tidak menjadi robot atau bagian dari suku cadang mesin, melainkan sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi ini; pengendali mesin.

Era industrialisasi menyangkut proses perubahan sosial. Peristilahan mutakhir menggunakan istilah perubahan dari LDC (Less Developed Country) menuju MDC (More Developed Country). Marilah kita ambil salah satu teori tentang perubahan tersebut. Tonnies mengkontraskan hubungan-hubungan "natural dan organis" keluarga, desa dan kota kecil (*gemeinschaft*) dengan kondisi yang "artifisial" dan "teriolasi" dari kehidupan kota dan masyarakat industri (*gesellschaft*), di mana hubungan-hubungan asli dan natural manusia satu sama lainnya telah dikesampingkan. Setiap orang berjuang untuk keuntungannya sendiri dalam suatu semangat kompetisi.

Parsons menguraikan lebih lanjut dikotomis Tonnies. Teori Parsons dikenal dengan *pattern variables*. Mengikuti teori Parsons ini kita dapat memperoleh gambaran mengenai perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat industri dan modern, yaitu perubahan-perubahan yang meliputi:

1. *Affectivity* ke *affectivity neutrality*, yaitu perubahan dari sikap bertindak karena hendak mendapatkan kesenangan segera ke sikap bertindak dengan kesediaan menunda atau meninggalkan kesenangan jangka pendek itu karena hendak mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Pengaruh langsung perubahan ini, bagi proses industrialisasi, ialah terbentuknya modal yang diperlukan, karena adanya kebiasaan menabung dan investasi, akibat ditinggalkannya penggunaan pendapatan untuk maksud-maksud konsumtif. *Affective neutrality* juga menandai hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat industrial yang bersifat *contractual, impersonal* dan *calculating*. Kebutuhan yang berlanjut kesenangan dan kepuasan segera dapat terpenuhi terutama melalui lembaga-lembaga tradisional, khususnya famili.

2. Perubahan dari *partikularisme* ke *universalisme*. Industrialisasi cenderung mengikis keekklusivan seperti, keekklusivan rasial, warna kulit, dan keturunan. Partikularisme semacam ini tidak efisien dan menjurus kepada penyiiaan tenaga. Masyarakat yang tingkat industrialisasinya tinggi adalah yang pola-pola universalistiknya menonjol dan karir terbuka untuk mereka yang benar-benar berbakat dan berkemampuan.

3. Perubahan dari *ascription* ke *achievement*. *Achievment* menjadi dasar rekrutmen, bukan lagi *ascription*, seperti nepotisme.

4. Perubahan dari *diffuseness* ke *specivicity*. Maksud perubahan ini ialah perubahan hubungan-hubungan yang semula beruang lingkup luas dan meliputi, ke hubungan-hubungan yang membatasi diri pada hal-hal tertentu yang bersifat

khusus. Contoh hubungan *diffuse*, hubungan anak dan ayah. Contoh hubungan kedua hubungan antara guru dengan murid yang terikat karena hal khusus yang menyangkut kegiatan pengajaran dan pendidikan (Guy Wotcher, *Talcott Parsons and American Sociology*, New York, 1975, p.38-39)

Jika era industrialisasi yang terjadi di Indonesia itu diasumsikan sebagai proses perubahan sosial seperti teori yang digambarkan di atas, maka interpretasi nilai-nilai keagamaan tidaklah merupakan suatu persoalan. Namun demikian, di sana sini akan terjadi benturan-benturan yang perlu diwaspadai sejak dini. Terutama menyangkut pada kepentingan keluarga yang terlibat bersama dalam proses industrialisasi. Dengan kata lain, keluarga dituntut menciptakan anggota-anggotanya menjadi individu yang mempunyai skill dan keahlian yang kompetitif sehingga tidak menjadi beban bagi anggota keluarga lainnya. Walaupun dalam ajaran agama, nilai dan harga diri keluarga itu menyatu dalam harga diri setiap individu dari anggota keluarga. Nilai kerja dan rekrutmen dalam Islam sudah jelas bahwa segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya.

#### Penutup

Karakteristik yang inheren dalam Islam memiliki sifat elastisitas karena jika tidak, maka Islam akan kehilangan perannya. Padahal, pada hakikatnya peran agama sama saja, baik dalam era primitif maupun era industrialisasi.

Nilai-nilai Islam, secara ontologi adalah nilai-nilai Ilahi dan insani. Sedangkan epistemologinya terdiri dari dua sumber: yakni wahyu dan akal serta

melahirkan nilai-nilai yang bersifat naqliyyah, 'aqliyyah, hisiiyyah-tajribiyyah, dan kasyfiyyah. Nilai-nilai tersebut, baik secara ontologis maupun epistemologis diarahkan oleh lima nilai aksiologis: jaminan dasar kebebasan beragama; jiwa dan raga; akal; keluarga; dan harta, baik milik pribadi maupun hak-hak masyarakat atas milik individu. Nilai aksiologis ini mengharuskan lahirnya pranata negara dan pemerintahan sebagai lembaga pelaksana nilai-nilai ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam.

Interpretasi nilai-nilai keagamaan

dalam era industrialisasi diperlukan penyesuaian dengan nilai-nilai Islam yang berpuncak pada tauhidullah dan tauhidul ummah. Format aksiologi interpretasi tersebut tetap mengacu kepada enam aksiologi serta pranata negara dan pemerintahan sebagai pemelihara pelaksanaan nilai-nilai itu untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Secara singkat, Karakteristik dan Nilai-nilai Islam itu dapat dilukiskan dalam gambar berikut



**Referensi**

Budhy Munawar Rachman, Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta, Yayasan Parunadina.

Guy Wotcher, Talcott Parsons and American Sociology, New York, 1975.

Henry Fratt Fairchild, Dictionary of Sociologi

and Related Sciences, Totowa, New Jersey, 1970.

Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, Bandung, Mizan, 1987.

Nurcholish Madjid, Islam, Iman dan Ihsan sebagai Trilogi Ajaran Islam.

Ronald Robertson, The Sociological Interpretation of Religion, New York, 1972.